

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

Deskripsi teori adalah hal penting sebagai petunjuk jawaban dari adanya rumusan masalah, hal ini dilakukan untuk memberi kemudahan dalam melakukan penelitian. Beberapa teori dari rumusan tersebut yaitu:

1. Peran

Berdasarkan KBBI, peran merupakan perangkat perilaku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang memiliki status dalam masyarakat.¹⁴ Sedangkan Ahmad Yani Kosali mengatakan:

“Peran ialah tahapan yang bergerak mengenai kedudukan (status), jika hak dan kewajiban telah dijalankan sesuai dengan kedudukannya maka dapat dikatakan telah melaksanakan perannya.”¹⁵

Sementara itu, Yulianus Rahawarin mengatakan bahwa:

“Peran yaitu suatu bagian tanggung jawab dari pimpinan atas terjadinya suatu peristiwa”.¹⁶

Pendapat lain mengenai peran yang dikemukakan oleh Moejiarto (dalam Jurnal Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa

¹⁴ <https://kbbi.web.id/>

¹⁵ Ahmad Yani Kosali, Peran LPMK dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Sako Palembang, *Jurnal Media Ekonomi dan Kewirausahaan (MEKU)*, Vol 1 No 1 2020, hal. 4

¹⁶ Yulianus Rahawarin, Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Masyarakat Di Desa Kumo Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 4 No. 63, 2018, hal. 73

Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa) yang mengatakan bahwa:

”Peran adalah suatu hal yang menunjukkan kedudukan (status) terhadap sesuatu”.¹⁷

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa peran yaitu bentuk status yang dimiliki seseorang dengan tujuan untuk menjalankan hak dan kewajibannya.

2. BUMDes

a. Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan usaha yang mengatur strategi pengembangan desa yang melibatkan masyarakat berperan aktif di dalamnya, hakikatnya BUMDes didirikan dan dijalankan menggunakan asas kebersamaan dan gotong royong yang disertai dengan semangat kebersamaan. Adapun fungsi dari BUMDes yaitu mengembangkan usaha dan pembagunan desa, pemberdayaan masyarakat, menyalurkan bantuan kepada masyarakat kurang mampu melalui hibah, basos, dan APBD.¹⁸

Menurut Permendagri No.39 Tahun 2010, BUMDes merupakan usaha yang berpusat di desa dengan pemerintah desa sebagai pendirinya serta kepemilikan asset serta manajemennya diatur langsung

¹⁷ Deibby K. A Pangkey, Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa, *Politico: Jurnal Ilmu Politik* Vol 3 No 1 2016, hal. 4

¹⁸ Irfan Nusrsetiawan, Stratetegi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi BUMDes, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol 4 No 2 2018, hal. 75

oleh pemerintah desa dan masyarakat.¹⁹ Maryunani berpendapat bahwa BUMDes ialah badan usaha yang diatur masyarakat dan pemerintah untuk mempertahankan ekonomi serta menciptakan ikatan sosial antar masyarakat yang diciptakan atas dasar kebutuhan dan potensi desa.²⁰

Dari pengertian diatas didapati kesimpulan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah usaha yang dikelola oleh masyarakat dan desa guna untuk meningkatkan perekonomian dengan tujuan mendapatkan laba serta mengutamakan asas kebersamaan dan gotong royong.

b. Syarat Pendirian BUMDes

Pendirian BUMDes memiliki beberapa point dalam Permendagri No.39 Tahun 2010 mengenai Badan Usaha Milik Desa pasal 5 ayat (1) berdasarkan pada:

- 1) Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
- 2) Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat
- 3) Sesuai kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- 4) Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;

¹⁹ Ratna Azis Prasetyo, Peranan BUMDes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, *Jurnal Dialektika* Vol 9 No. 1 2016, hal. 96

²⁰ Samadi, dkk, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Studi Pada BUMDes Pada Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu), *Jurnal Mahasiswa Prodi Manajemen UPP* Vol 2 No 1, 2015, hal. 6

- 5) Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
- 6) Adanya unit unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
- 7) Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.²¹

Untuk mendirikan BUMDes, pemerintah desa harus memenuhi syarat-syarat di atas. BUMDes tidak mungkin berdiri tanpa adanya peran dari pemerintah desa maupun masyarakat, sehingga diharapkan pemerintah desa dan masyarakat bekerja sama dalam pembangunan BUMDes demi memaksimalkan ekonomi dan pendapatan desa dengan mengelola potensi yang ada.

c. Prinsip – Prinsip BUMDes

Prinsip-prinsip BUMDes memiliki peran besar untuk dipelajari dan dipahami oleh seluruh masyarakat dan pemerintah desa. Terdapat enam prinsip dalam mengelola BUMDes, diantaranya:

- 1) Kooperatif, seluruh bagian yang ikut serta menjadi bagian BUMDes diwajibkan mampu menerapkan kolaborasi yang bagus untuk perkembangan dan jalannya usaha.

²¹ Hayyuna, Pratiwi dan Mindarti, Strategi Manajemen Aset Bumdes dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi Pada Bumdes di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik), *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2014, hal. 11

- 2) Partisipatif. Dalam hal ini seluruh bagian harus ikut berpartisipasi dalam BUMDes dan memberikan dorongan atau turut andil dalam usaha.
- 3) Emansipatif. Dalam hal ini seluruh anggota BUMDes diberi perlakuan secara rata tanpa melihat dari kalangan, suku, agama.
- 4) Transparan, kegiatan hendak mempengaruhi pada kepentingan masyarakat wajib diketahui oleh umum dengan mudah serta terbuka.
- 5) Akuntabel, memberikan pertanggung jawaban secara teknis ataupun administratif terhadap aktivitas yang akan dilakukan.
- 6) Sustainable, segala aktivitas wajib bersifat berkelanjutan serta dapat dipertahankan oleh masyarakat.²²

BUMDes yang dikelola bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa itu. Oleh sebab itu, terdapat beberapa prinsip yang harus dijalankan agar BUMDes berjalan dengan baik. Ekonomi suatu desa bergantung pada BUMDes karena BUMDes bisa saja menjadi sumber utama perekonomian desa tersebut. Sehingga pemerintah desa harus pandai dalam menemukan potensi-potensi sumber daya manusia demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

²² Hayyuna, Pratiwi dan Mindarti, Strategi Manajemen Aset Bumdes dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi Pada Bumdes di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik), *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2014, hal. 13

d. Peran BUMDes

Keberadaan BUMDes tentu saja tidak terlepas dari perannya, seperti halnya yang tercantum dalam UU RI No.6 Tahun 2014 mengenai desa menyatakan hasil dari BUMDes dimanfaatkan untuk mengembangkan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan anggaran belanja.²³

Adapun peran BUMDes diantaranya:

- 1) Menjadi jembatan pemerintah ke desa dalam mengembangkan sumber potensi alam dan manusia di desa menjadi sumber ekonomi
- 2) Mengawasi kegiatan-kegiatan ekonomi desa
- 3) Meningkatkan kesejahteraan BUMDes dan masyarakat desa
- 4) Menjadi media pemerintah untuk mewujudkan rencana pembangunan terpadu.²⁴

BUMDes didirikan dengan tujuan agar menciptakan ekonomi desa yang mandiri dengan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Perlu adanya pembaruan yang dilakukan supaya BUMDes yang telah ada sebelumnya bisa berjalan sesuai dengan peranannya. Tujuan dan sasaran BUMDes bisa terlaksana jika dikelola secara sistematis dan

²³ Adiestya Dwi Astari, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Ekonomi melalui Pemberdayaan Masyarakat*, (Skripsi: IAIN Purwokerto, 2020), hal. 18

²⁴ Seyadi, *Sebagai Alternative Lembaga Keuangan Desa*, (Yogyakarta: UPP STM YKPN, 2003), hal. 23

profesional. BUMDes sebagai solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi dan sebagai harapan agar dapat mendorong dan menggerakkan ekonomi desa. Eksistensi BUMDes membawa pengaruh untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola potensi desa kreatif dan inovatif, maka dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang nantinya dapat menyerap tenaga kerja di pedesaan.

Menurut Rahmawati, pengelolaan BUMDes dinyatakan berhasil apabila dilakukan dengan efisien. Keberhasilan pengelolaan juga dapat dinyatakan berhasil apabila dilakukan secara efektif. Tanggung jawab manajemen dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi sumberdaya untuk mencapai tujuan BUMDes. Dengan begitu pengelolaan BUMDes akan mampu memberikan dampak yang baik untuk perekonomian masyarakat.²⁵

e. Manfaat BUMDes

Peningkatan pembangunan desa melewati pengembangan potensi perekonomian desa sebagai wadah bersama masyarakat desa dengan maksud untuk mengembangkan diri dan lingkungannya secara mandiri dan partisipatif. Keberadaan BUMDes sebagai salah satu wadah untuk menuangkan ide ide masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, mengatur dan memanfaatkan potensi dan sumber daya alam desa, memaksimalkan SDM dalam pengelolaannya. Dilain hal posisi

²⁵ Emma Rahmawati, Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Bandung Barat, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* Vol 25 No. 1 April 2020.

pemberian modal dari pemerintah desa dalam bentuk biaya dan kekayaan desa yang diberikan untuk diatur sebagai bagian dari BUMDes. BUMDes yang ideal mampu menjadi poros kehidupan masyarakat desa sebab dilahirkan sebagai sasaran sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat, dapat menampung kapasitas produksi masyarakat serta aksesnya terbuka untuk masyarakat desa secara umum.²⁶

Adapun manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Komersil

BUMDes selaku badan yang mampu menambah penghasilan masyarakat sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan terhadap masyarakat desa. Potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa, terutama bagi kaum pemuda pemudi desa dapat dimanfaatkan sehingga menekan laju urbanisasi.

2) Manfaat pelayanan publik

Memperoleh manfaat pada bidang bisnis yang menjadi tujuan utama BUMDes wajib memantau kepentingan sosial masyarakat desa. Sebagai contoh penyediaan air bersih, pelayanan sampah, pelayanan kesehatan yang keseluruhannya menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

²⁶ Abdul, Rahman Suleman, dkk., *BUMDes Menuju optimalisasi Desa*, (Yayasan Kita Menulis 2020), hal. 38

3) Manfaat ekonomi

Adanya BUMDes ditujukan meningkatkan pendapatan asli desa, BUMDes juga diharapkan mampu mengatur aset desa serta menjadi rangsangan bagi perekonomian masyarakat. Hal yang menjadi keuntungan diperoleh BUMDes digunakan secara maksimal untuk pembangunan pedesaan

4) Manfaat Politik

Berdasarkan musyawarah mufakat, BUMDes dibentuk, dikonseptualisasikan bentuk usahanya, struktur organisasinya, rencana kerja, operasional usaha sampai evaluasi kinerja BUMDes.

5) Manfaat sosial

Manfaat sosial dapat terjalin hubungan silaturahmi masyarakat desa menambah jaringan masyarakat sehingga memudahkan untuk bertukar informasi.²⁷

Dengan berdirinya BUMDes, seluruh masyarakat desa akan merasakan dampak baik yang diberikan. Demi mendapatkan manfaat ini pemerintah desa harus menentukan program yang tepat untuk masyarakat. Hal ini bisa dicapai melalui sosialisasi dan pelatihan serta pendekatan bagaimana menumbuhkan jiwa masyarakat terhadap perekonomian desa. Dengan begitu, manfaat yang dicapai juga akan

²⁷ Abdul, Rahman Suleman, dkk., *BUMDes Menuju optimalisasi Desa*, (Yayasan Kita Menulis 2020), hal. 39

maksimal sehingga perekonomian dan kesejahteraan desa dapat meningkat.

f. Tujuan Pendirian BUMDes

Sesuai dengan pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 tahun 2015 tentang BUMDes tujuan pendirian BUMDes yaitu:

- 1) Meningkatkan perekonomian desa
- 2) Memaksimalkan aset desa agar berguna untuk kesejahteraan desa
- 3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam mengatur potensi desa
- 4) Memajukan rencana kerjasama usaha antar desa dan pihak ketiga
- 5) Membuat peluang dan jaringan pasar yang memberi *support* layanan umum masyarakat
- 6) Membuka lapangan kerja
- 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
- 8) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.²⁸

Selain tujuan-tujuan tersebut, Badan Usaha Milik Desa juga memiliki empat tujuan utama yaitu (1) Menambah perekonomian desa; (2) menambah pendapatan asli desa; (3) mengatur potensi desa sesuai kebutuhan masyarakat; dan (4) menjadi sumber utama yang menopang

²⁸ Abdul, Rahman Suleman, dkk., *BUMDes Menuju optimalisasi Desa*, (Yayasan Kita Menulis 2020), hal. 40

perekonomian desa.²⁹ Jadi, dengan berdirinya BUMDes diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan bisa menjadi sumber pendapatan masyarakat yang berdampak pada menurunnya angka pengangguran dan kesejahteraan desa dapat terjamin.

g. Jenis usaha BUMDes

Sesuai dengan pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 tahun 2015 tentang BUMDes tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Usaha BUMDes dapat dibagi menjadi 6 jenis usaha, antara lain:

- 1) *Serving*, yaitu BUMDes mengoprasikan kegiatan bisnis yang bersifat sosial dengan maksud utama yaitu untuk memberi pelayanan kepada warga. Usaha BUMDes walaupun tak mendapat *economic profit* dalam jumlah yang besar tetapi memberikan *social benefits* kepada warga. Contohnya antara lain usaha air minum desa baik pengelolaan air bersih maupun air minum, pengelolaan sampah, usaha listrik desa, lumbung pangan.
- 2) *Banking*, BUMDes menjalankan usaha pada bidang keuangan dengan tujuan mencukupi keperluan keuangan masyarakat desa tentunya menggunakan bunga yang lebih rendah dibandingkan yang diperoleh masyarakat desa dari para lintah darat dan bank

²⁹ Lativah P. Zandri, dkk., Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (*BUMDes*) Dharma Utama, *Working Paper Keuangan Publik Islam* No. 9 Seri 1 Tahun 2018, hal. 3

konvensional. Contohnya Bank Desa, Lembaga Perkreditan Desa atau Lembaga Keuangan Mikro Desa, Unit Usaha Dana Bergulir.

- 3) *Ranting*, merupakan BUMDes menjalankan unit rental sebagai bentuk pelayanan terhadap keperluan masyarakat setempat sekaligus menambah pendapatan desa. Contohnya penyewaan traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah atau toko, tanah.
- 4) *Brokering*, BUMDes sebagai jembatan yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar masyarakat sehingga masyarakat tidak menjumpai kendala dalam memasarkan produknya ke pasar. Contoh pemasaran hasil pertanian dan perkebunan, jasa pembayaran listrik, jasa perpanjangan kendaraan bermotor dan mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk produk yang dihasilkan masyarakat.
- 5) *Trading*, jenis usaha ini BUMDes melakukan bisnis dengan menciptakan maupun memperjual belikan barang tertentu agar memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan untuk jangkauan pasar yang lebih luas. Contoh pabrik es, hasil pertanian, sarana produksi pertanian.
- 6) *Holding*, merupakan jenis usaha yang dijalankan bersama BUMDes sebagai induk unit usaha yang ada di desa, tiap bagian yang berdiri sendiri dikelola oleh BUMDes sehingga terbentuk usaha bersama. Contoh kapal desa yang berskala besar untuk mengumpulkan dan

mewadahi nelayan nelayan kecil, desa wisata yang mengelompokkan berbagai jenis usaha dari masyarakat.³⁰

Adapun macam unit BUMDes diatur sehingga sesuai dengan potensi ekonomi masyarakat desa serta mempunyai prospek usaha yang baik kedepannya. Jenis kegiatan BUMDes sebagaimana diatur dalam pasal 12 dan 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa antara lain: (a) Jasa; (b) Penyaluran sembilan bahan pokok; (c) perdagangan hasil pertanian; dan (d) Industri kecil dan rumah tangga. Penggolongan jenis kegiatan BUMDes dibagi menjadi Unit Usaha Desa, dan pemilihannya dilakukan melalui musyawarah desa.³¹

h. Hambatan yang Dihadapi BUMDes

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah, desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa jika untuk menambah pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa bisa mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa. Sehingga pembentukan BUMDes didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

³⁰ Abdul, Rahman Suleman, dkk., *BUMDes Menuju optimalisasi Desa*, (Yayasan Kita Menulis 2020), hal. 40

³¹ Amelia Sri Kusuma Dewi, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa, *Journal of Rural and Development* Vol 5 No. 1 Februari 2014, hal. 10.

Menurut penelitian Ibrahim, faktor penghambat BUMDes adalah:³²

1. Faktor Anggaran

Hadirnya BUMDes dalam melaksanakan program dan usaha tidak lepas dari anggaran yang dimiliki. Sebagai lembaga usaha, adanya modal usaha digunakan untuk pengembangan BUMDes. Hadirnya dana usaha yang tidak terlalu banyak dan kemampuan manajemen yang buruk dapat menyebabkan kebangkrutan suatu usaha.

Menurut Ibrahim, keberadaan BUMDes dalam melaksanakan program dan usaha tidak lepas dari anggaran yang dimiliki. Sebagai lembaga usaha, keberadaan modal usaha digunakan untuk pengembangan BUMDes. Kesiapan dana usaha yang terbatas dan tingkat kemampuan pengelola yang buruk akan menyebabkan kemunduran suatu usaha.³³

2. Faktor Sumber Daya Manusia Pengelola

Otonomi desa ialah peluang terhadap desa untuk mengembangkan desa berdasar dengan potensi yang dimiliki. Hadirnya BUMDes selaku instrumen dalam menambah kesejahteraan dengan membawa masyarakat pada pengelolaan

³² Ibrahim, dkk., Faktor Penghambat dan Pendukung Badan Usaha Milik Desa Pada Kaawasan Pertambangan Emas di Sumbawa Barat, *Sosiohumaniora – Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 21 No. 3 November 2019, hal. 351.

³³ Ibrahim, dkk. Faktor Penghambat dan Pendukung Badan Usaha Milik Desa Pada Kawasan Pertambangan Emas di Sumbawa Barat, *Sosiohumaniora – Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 21 No. 3 November 2019, hal. 351.

memiliki keterbatasan pada mengembangkan usaha. Keberadaan BUMDes masih memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk meningkatkan sumber manusia pengelola.

3. Terbatasnya Dukungan dari Pihak Swasta

Pemberdayaan BUMDes dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan kemandirian ekonomi desa berdasarakan pengembangan kemandirian ekonomi desa melalui pengembangan kelembagaan serta pemberdayaan manajemen usaha ekonomi masyarakat yang dilaksanakan dengan keterlibatan masyarakat, pemerintah dan swasta sehingga semua berperan maksimal dalam menumbuh kembangkan perekonomian desa.

Secara umum pengelolaan pada suatu BUMDes memiliki hambatan yang berupa :

- 1) Pemilihan program yang sesuai dengan masyarakat
- 2) Minimnya kesadaran masyarakat terhadap adanya BUMDes
- 3) Kurang terorganisirnya manajemen pengelolaan yang terdapat di pasar desa
- 4) Persoalan mengenai perkreditan
- 5) Kendala mengenai akses pemasaran produk masyarakat
- 6) Permodalan BUMDes yang masih terbatas
- 7) Kurangnya kompetensi pengelola BUMDes³⁴

³⁴ Lativah P. Zandri, dkk., Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (*BUMDes*) Dharma Utama, *Working Paper Keuangan Publik Islam* No. 9 Seri 1 Tahun 2018, hal. 9

i. Upaya BUMDes dalam Mengatasi Hambatan

Dalam mengatasi hambatan yang terjadi di BUMDes, diperlukan adanya upaya agar masalah tersebut dapat teratasi. Adapun upaya yang dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Menganalisa masalah yang terjadi di lapangan
- 2) Mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya peran BUMDes
- 3) Terjun langsung untuk memperbaiki permasalahan manajemen
- 4) Menyediakan penawaran solusi perkreditan yang ringan bagi masyarakat
- 5) Menyelenggarakan pelatihan manajemen usaha pada masyarakat secara bertahap
- 6) Memaksimalkan sumber permodalan
- 7) Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pengelola
- 8) Mengadakan evaluasi dan kontrol.

BUMDes tidak hanya memiliki keunggulan saja, melainkan juga memiliki kelemahan. Bantuan dana dari pemerintah kabupaten tidak cukup untuk pengembangan BUMDes. Hal ini terjadi karena ketertarikan masyarakat untuk melakukan pinjaman besar, namun dana yang dimiliki tidak cukup. Selain itu, terbatasnya SDM juga merupakan kelemahan dalam mengembangkan BUMDes.

Rendahnya pengetahuan masyarakat merupakan salah satu hambatan untuk memulai kelompok usaha. Melimpahnya potensi yang

dimiliki desa seharusnya dapat diurus dengan baik namun diabaikan sebab masyarakat enggan memulai menjalankan usaha.³⁵

Jadi, pengadaan evaluasi dan kontrol sangat penting dilakukan untuk mengetahui apa yang terjadi dalam BUMDes seperti hambatan yang terjadi dan *feedback* masyarakat terkait kinerja BUMDes sehingga pihak BUMDes dapat memperbaikinya.

3. Pengelolaan BUMDes

Dalam KBBI, pengelolaan merupakan proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.³⁶

Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa:

“Pengelolaan adalah suatu tindakan yang terdiri dari penyusunan data, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan dan penilaian yang menghasilkan sesuatu yang merupakan sumber penyempurna dan meningkatkan pengelolaan selanjutnya.”³⁷

Sementara itu, Trisnawati mengatakan bahwa:

³⁵ Edy Yusuf Agunggunanto, dkk., Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), *JDBE* Vol 13 No. 1 Maret 2016, hal. 75.

³⁶ <https://kbbi.web.id/>

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Pengelolaan Kelas dan Siswa*, (Jakarta: Rajawali, 1998), hal. 8.

“Pengelolaan adalah proses untuk menyelesaikan sesuatu yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dengan melibatkan tiga faktor yaitu adanya penggunaan sumber daya organisasi, proses yang bertahap dan adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.”³⁸

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan merupakan suatu proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

Pengelolaan bertujuan untuk mengatur SDM dan sarana prasarana dalam badan usaha dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Ada beberapa tujuan pengelolaan, yaitu:

- a) Untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
- b) Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan.
- c) Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.

Tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai apabila organisasi melakukan langkah-langkah yang tepat, yaitu:³⁹

- a) Menentukan strategi
- b) Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- c) Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas, dan batasan waktu

³⁸ Erni Trisnawati dan Kurniawan Safullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), hal. 6.

³⁹ Irine Diana Wijayanti, *Manajemen* (Yogyakarta: Mitra Cendikia Press, 2008), hal. 59.

- d) Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana
- e) Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
- f) Menentukan ukuran untuk menilai
- g) Mengadakan pertemuan
- h) Pelaksanaan
- i) Mengadakan penilaian
- j) Mengadakan review secara berkala
- k) Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang.

Menurut Kasmir, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan suatu usaha, yaitu perencanaan, sumber daya manusia, kepemimpinan, dan permodalan.⁴⁰ Dari beberapa faktor tersebut, sumber daya manusia ialah bagian terpenting untuk pengembangan usaha. Karena kualitas tenaga kerja yang baik akan meningkatkan kinerja suatu usaha dan akan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya pendapatan usaha tersebut.

Budiarta menjelaskan beberapa tahapan pengembangan usaha yang meliputi ide usaha, seleksi ide/konsep usaha, mengembangkan rencana usaha (*business plan*), dan menjalankan rencana usaha serta pengendalian usaha.⁴¹ Dalam rangka pengembangan usaha, ide usaha merupakan modal awal. Ide usaha ini dapat muncul dari berbagai sumber seperti mengamati keberhasilan bisnis orang lain. Setelah itu, ide ini dituangkan ke dalam suatu konsep usaha kemudian membuat rencana usaha (*business plan*). Rencana usaha

⁴⁰ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 154

⁴¹ Kustoro Budiarta, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2009), hal. 153

yang telah dibuat, kemudian akan diimplementasikan dengan sumber daya seperti modal dan tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan usaha.

Dalam mengembangkan usaha, Hendro mengemukakan beberapa strategi yaitu mengembangkan bisnis dengan mengembangkan segmen pasar, kerja sama, sinergisme, dan mengembangkan bisnis yang sedang stabil.⁴² Dalam mengembangkan pasar, pengelola bisnis perlu memperhatikan produk dan sistem penjualan. Selain itu, mengadakan perjanjian kerjasama juga penting dilakukan untuk memperkuat usaha dan menambah relasi. Pada bisnis yang sedang stabil memang tidak banyak hal yang perlu dilakukan, namun untuk menjaga bisnis tetap stabil perlu dilakukan efisiensi produk dan strategi pemasaran yang kreatif dan inovatif untuk memperkuat bisnis dan merek dagang.

4. Desa

Menurut KBBI, Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati sejumlah keluarga dan memiliki sistem pemerintahan sendiri dengan kepala desa sebagai pemimpinnya.⁴³ Desa juga merupakan bagian dari pemerintah negara yang berada di tingkat lokal yang memiliki wewenang tertentu, dalam hal ini desa memiliki wewenang untuk mengatur kehidupan secara mandiri (otonom).⁴⁴

Koentjaraningrat dalam bukunya mengatakan bahwa:

⁴² Hendro, *Dasar-dasar Kewirausahaan*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hal. 515

⁴³ <https://kbbi.web.id/>

⁴⁴ Sarip, dkk, Dampak Covid 19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Dan Pembangunan Desa, *Jurnal Penelitian Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol 5 No 1. 2020, hal. 14

“Desa merupakan komunitas yang menetap dan tetap pada suatu tempat.”⁴⁵

Sedangkan R. Bintarto dalam bukunya menjelaskan bahwa:

“Desa yaitu suatu hasil antara kelompok orang dan lingkungan di sekitarnya yang kemudian hasil tersebut berupa wujud kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh adanya unsur-unsur seperti fisiografi, sosial, politik, ekonomi dan juga kebudayaan yang saling berinteraksi satu sama lain.”⁴⁶

Dari definisi di atas peneliti menyimpulkan bahwa desa adalah wilayah yang berada di tingkat lokal dan memiliki wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri serta memiliki pemimpin yang disebut dengan kepala desa.

5. Strategi Pengembangan

Sesra Budio mengemukakan pendapatnya mengenai strategi dan mengatakan bahwa:

“Strategi adalah pendekatan menyeluruh yang menghubungkan keunggulan rencana perusahaan dengan lingkungannya yang diatur untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai melalui pendekatan yang tepat oleh organisasi”.⁴⁷

⁴⁵ Koentjaraningrat, *Masyarakat Desa di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984).

⁴⁶ R. Bintarto, *Interaksi Desa-Kota*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)

⁴⁷ Sesra Budio, Strategi Manajemen Sekolah, *Jurnal Menata* Volume 2 No 2, 2019, hal. 59

Sementara pendapat lain mengenai strategi oleh Arnoldo C. Hax dan Nicholas S. Manjlik dalam Jurnal Hukum Islam, yang mengatakan:

“Strategi merupakan upaya perusahaan untuk mencapai pengembangan nilai korporasi, kapabilitas manajerial, tanggung jawab organisasi serta sistem administrasi untuk pengambilan keputusan strategik dan operasional pada seluruh tingkatan”.⁴⁸

Sedangkan Hamduh Hanafi berpendapat bahwa:

“Strategi merupakan pengambilan tujuan jangka panjang yang memiliki dasar dari suatu organisasi beserta pemilihan alternatif tindakan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut”.⁴⁹

Berdasarkan uraian tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa strategi merupakan upaya untuk menjalankan rencana jangka panjang dengan tujuan tertentu serta dapat meningkatkan kekuatan baik dari sisi eksternal maupun internal.

Moekijat berpendapat bahwa:

“Pengembangan merupakan upaya perusahaan untuk memperbaiki kinerja saat ini maupun dimasa mendatang dengan memberikan informasi, mempengaruhi sikap serta menambah kecakapan”.

⁴⁸ Siti Aminah Chaniago, Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat, *Jurnal Hukum Islam* Volume 12 Nomor 1, 2014, hal. 89

⁴⁹ Hamduh Hanafi dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), hal. 53

Pendapat lain mengenai pengembangan oleh Cushway Barry yang mengatakan bahwa:

“Pengembangan merupakan pembekalan pengetahuan terhadap seseorang, keahlian dan pengalaman agar mereka mampu melaksanakan peran serta tanggung jawab yang lebih besar dan menuntut kemampuan mereka”.⁵⁰

Sedangkan Sugiyono mengatakan bahwa:

"Pengembangan merupakan langkah untuk menguji efektifitas, validasi rencana yang telah dibuat, sehingga menghasilkan produk yang teruji serta bermanfaat bagi masyarakat luas".⁵¹

Lalu menurut pengertian strategi pengembangan menurut Nimran yaitu:

“Strategi pengembangan adalah usaha yang terencana dan berkelanjutan untuk menerakan ilmu perilaku guna pengembangan sistem dengan menggunakan metode refleksi dan analisis diri”.⁵²

Berdasarkan uraian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pengembangan merupakan sikap untuk memperbaiki diri dengan pembekalan baik itu pengetahuan, pengalamann, skill dan juga kecakapan agar kedepannya mereka mampu menjalankan tanggung jawab yang lebih besar.

⁵⁰ Rina Irawati, Pengaruh Pelatihan dan Pembinaan Terhadap Pengembangan Usaha Kecil, *Jurnal JIBEKA* Volume 12 No 1, 2018, hal.76

⁵¹ Khairul Rahman dan Siti Mutmainah, Pengembangan Desain Kerajinan Anyam Bambu Desa Kalinganyae Pulau Kangean, *Jurnal Pendidikan Seni Rupa*, 2015, hal. 112

⁵² Umar Nimran, *Perilaku Organisasi*, (Surabaya: Citra Media, 1997), hal. 109.

Dari pernyataan diatas peneliti menarik sebuah kesimpulan bahwa strategi pengembangan merupakan langkah mengambil keputusan dengan pertimbangan pemikiran jangka panjang dan disertai dengan perbaikan sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik untuk masyarakat maupun lembaga yang bersangkutan.

Nimran menyatakan jika strategi pengembangan merupakan usaha yang sistematis dan berkelanjutan untuk menerapkan ilmu perilaku dengan tujuan pengembangan sistem dengan menggunakan metode refleksi dan analisis diri.⁵³ Strategi pengembangan merupakan langkah mengambil keputusan dengan pertimbangan pemikiran jangka panjang dan disertai dengan perbaikan sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik untuk masyarakat maupun lembaga yang bersangkutan.

6. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan rancangan pembangunan ekonomi yang mencakup nilai nilai kehidupan bermasyarakat dengan tujuan membangun paradigma baru yang bersifat *people centered, parcipatority, empowerment and sustainable*⁵⁴. Pengertian lain dari pemberdayaan masyarakat yaitu suatu tahapan pembangunan yang menjadikan masyarakat berkeinginan untuk memulai kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.⁵⁵ Sedangkan pengertian pembedayaan masyarakat

⁵³ Umar Nimran, *Perilaku Organisasi*, (Surabaya: Citra Media, 1997), hal. 109.

⁵⁴ Munawar Noor, Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Civis* Vol 1 No 2, 2011, hal. 88

⁵⁵ Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: CV Budiutama, 2019), hal. 8

menurut Rifa'i ialah upaya memberdayakan untuk mengembangkan suatu pihak dari keadaan kurang berdaya menjadi memiliki daya guna mencapai kehidupan yang lebih baik.⁵⁶

Berdasarkan pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah langkah pembangunan ekonomi yang menyertakan masyarakat sebagai pusatnya dengan niat membenahi situasi dan kondisi kehidupannya.

1) Tujuan pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto:

a. Perbaikan Kelembagaan “ *Better Institution* ”

Lembaga yang baik merupakan lembaga yang memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas, sasaran yang tepat, serta progam kerja terarah. Seluruh anggota melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik serta memastikan anggotanya merasa memiliki kompetensi untuk mengembangkan lembaga tersebut.

b. Perbaikan usaha “ *Better Business* ”

Setelah perbaikan lembaga harapannya dapat berdampak pada bisnis dari lembaga tersebut. Tercapainya rasa puas dari para anggota kelembagaan dan masyarakat secara umum.

c. Perbaikan pendapatan “ *Better Income* ”

⁵⁶ Bachatiar Rifa'i, Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Progam Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* Vol 1 No 1, 2013, hal. 132

Perbaikan bisnis menjadi lebih baik diharapkan dapat membawa tambahan pendapatan bagi lembaga, anggota dan juga masyarakat.

d. Perbaikan lingkungan “ *Better Environment* ”

Dampak dari kemiskinan dan pendapatan yang terbatas yaitu rusaknya lingkungan baik secara fisik maupun sosial, diharapkan setelah perbaikan pendapatan nantinya akan berpengaruh juga terhadap lingkungan tempat tinggal masyarakat.

e. Perbaikan kehidupan “ *Better Living* ”

Adapun indikator yang mencerminkan beberapa tingkat kehidupan manusia yaitu tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan juga daya beli, dengan pendapatan yang mebaik maka diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan masyarakat.

f. Perbaikan masyarakat “ *Better Community* ”

Apabila masyarakat memiliki kehidupan yang baik maka akan membentuk kehidupan kelompok yang baik pula. Hal ini didukung oleh lingkungan fisik yang baik.

Pemberdayaan masyarakat sebagai strategi alternatif telah berkembang meskipun belum maksimal dalam penerapannya. Topik ini erat kaitannya dengan kemajuan dan perubahan bangsa apalagi bila dikaitkan dengan skill masyarakat yang masih kurang akan sangat menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

2) Prinsip – prinsip pemberdayaan masyarakat

a. Prinsip kesetaraan

Merupakan prinsip mengenai kesejajaran masyarakat dalam lembaga, baik berjenis kelamin laki laki maupun perempuan diharapkan dapat bekerjasama dalam proses belajar, saling membantu, saling mendukung dan juga bertukar pemikiran.

b. Prinsip partisipasi

Progam pemberdayaan yang dapat merangsang kemandirian masyarakat merupakan progam yang bersifat partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat. Perlu arahan dan pendampingan agar kedepannya masyarakat dapat mengembangkan potensinya.

c. Prinsip keswadayaan atau kemandirian

Prinsip ini lebih mengutamakan kemampuan masyarakat dari pada bantuan dari pihak lain. Berfokus untuk memberikan bekal dan pendampingan agar kedepannya masyarakat menjadi lebih mandiri.

d. Prinsip berkelanjutan

Progam pemberdayaan perlu dikonsep agar dapat terus berkelanjutan, peran pendamping sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan progam ini. Meskipun awalnya peran pendamping lebih dominan namun lambat laun perannya akan berkurang dan diserahkan pada masyarakat secara mandiri untuk menegolanya.

Secara bertahap program tersebut dapat dikembangkan sendiri oleh masyarakat sesuai potensinya.⁵⁷

Selain prinsip-prinsip di atas, ada upaya yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat yaitu: (1) *Enabling*, yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang; (2) *Empowering*, yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya; dan (3) *Protecting*, yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.⁵⁸

Pendekatan pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung, demokratis dan pembelajaran sosial.

3) Tahap – tahap pemberdayaan masyarakat

Menurut Mardikianto dalam penelitian Devy Novitasari menyatakan bahwa terdapat tujuh tahapan pemberdayaan masyarakat, diantaranya:

- a. Tahapan pertama merupakan memunculkan niat dari diri seseorang untuk memperbaiki.

⁵⁷ Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: CV Budiutama. 2019), hal. 11

⁵⁸ Munawar Noor, *Pemberdayaan Masyarakat*, *Jurnal Ilmiah CVIS* Vol 1 No. 2 Juli 2011, hal. 95.

- b. Tahapan kedua adalah untuk terpenuhinya perubahan dan perbaikan melalui pemberdayaan dibutuhkan keinginan dan keberanian untuk melepaskan diri dari hambatan yang dihadapi.
- c. Tahap yang ketiga adalah dibutuhkan adanya pengembangan keinginan agar mengikuti kegiatan pemberdayaan.
- d. Tahap yang keempat adalah memaksimalkan peran dan partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan.
- e. Tahap yang kelima adalah memaksimalkan peran yang bertujuan untuk mengembangkan motivasi perubahan.
- f. Tahap yang keenam adalah upaya menambah efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan pemberdayaan
- g. Tahap yang ketujuh adalah peningkatan keahlian untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan terbaru.⁵⁹

Disamping pentingnya pemberdayaan masyarakat juga terdapat beberapa permasalahan yang dapat mengganggu pengimplementasian pemberdayaan masyarakat. Menurut Kurniawati permasalahan tersebut menyangkut ketiadaan konsep yang jelas mengenai apa itu pemberdayaan masyarakat, batasan masyarakat yang suksese

⁵⁹ Sulistyani, A.T. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hal. 83.

melaksanakan pemberdayaan, peran masing-masing pemerintah, masyarakat dan swasta, mekanisme pencapaiannya dan sebagainya.⁶⁰

Selain itu, usaha ekonomi produktif yang ada atau akan dibentuk pada masing-masing wilayah diidentifikasi berdasarkan kriteria tertentu, dipilih untuk dikembangkan sebagai sasaran pembinaan. Pengembangan dilakukan melalui pembinaan manajemen usaha, bantuan modal bergulir dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

4) Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat

Menurut UNICEF terdapat lima dimensi yang digunakan sebagai tolak ukur dalam keberhasilan pemberdayaan masyarakat, diantaranya kesejahteraan, kesadaran kritis, akses, partisipasi serta kontrol. Adapun hal lain yang turut mencakup keberhasilan program pemberdayaan yaitu:

- a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin
- b. Terdapat perkembangan usaha yang dilakukan penduduk untuk meningkatkan pendapatan
- c. Mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai kesejahteraan keluarga miskin yang terdapat di lingkungan sekitar
- d. Bertambahnya kesadaran kelompok yang ditandai dengan adanya perkembangan usaha hingga interaksi kelompok.

⁶⁰ Dwi Pratiwi Kurniawati, dkk., *Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 1 No. 4, hal. 11.

- e. Menambah jumlah masyarakat yang mengalami pemerataan pendapatan pada keluarga kurang mampu sehingga terpenuhinya kebutuhan pokok maupun kebutuhan sosial dasar.⁶¹

7. Perekonomian

Lipsey mengungkangkap bahwa:

“Perekonomian adalah studi yang membahas pemanfaatan sumber daya sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas”.

Sementara Paul A. Samuelson mengemukakan bahwa:

“Perekonomian yaitu usaha manusia untuk menggunakan berbagai sumber daya yang terbatas sebagai upaya untuk memenuhi komoditas serta menyalurkan kepada masyarakat untuk dikonsumsi”.

Adam Smith juga mengungkapkan pendapatnya mengenai perekonomian, ia berkata bahwa:

“Perkonomian merupakan pemeriksaan mengenai sebab dan akibat timbulnya kekayaan negara”.⁶²

Berdasarkan pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa perekonomian merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya sebaik mungkin dengan melibatkan faktor produksi, distribusi dan juga

⁶¹ Devy Novitasari, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Desa Sukorejo Gandusari Treggalek*, (Skripsi: IAIN Tulungagung, 2019), hal. 31

⁶² Eddy Soegiarto, Pengaruh Sawit Penggerak Perekonomian Indonesia Terhadap Pelestarian Hutan, *Jurnal Legalitas* Vol 2 No 1, 2017, hal. 83

konsumsi serta dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan maupun dinikmati sendiri.

8. Covid 19

Menurut *WHO (World Health Organization) Coronaviruses* merupakan virus yang menyerang pernafasan manusia, virus ini menyebabkan efek seperti flu biasa hingga gejala yang lebih akut seperti Mers-CoV dan SARS-Cov. Penularan dari virus ini sangat cepat dan penyebarannya sudah berdampak ke berbagai negara, salah satunya yaitu Indonesia. Penularan virus dapat melalui: 1) ludah atau bersin dari penderita Covid 19, 2) memegang mulut, hidung dan mata tanpa mencuci tangan setelah terkena ludah atau bersin dari penderita Covid 19, 3) Kontak langsung dengan penderita Covid 19.⁶³

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ressa Andriyani dkk menjelaskan bahwa pasien yang terjangkit virus Covid 19 tidak mengenal batasan usia. Adapun yang rawan terjangkit virus Covid 19 yaitu pada usia bayi, balita, anak anak dan juga lansia apalagi yang memiliki riwayat penyakit lain yang dapat memperparah keadaan.⁶⁴ Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa covid 19 merupakan virus yang menginfeksi bagian pernafasan yang tergolong berbahaya sebab penyebarannya sangat cepat oleh sebab itu perlu adanya pembatasan kegiatan mobilitas masyarakat

⁶³ Siti Nuzul Laila Nalini, Dampak Covid Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* Vol 4 No 1 2021, hal. 662

⁶⁴ Ressa Andriyani Utami dkk, Pengetahuan, Sikap Dan Keterampilan Masyarakat Dalam Pencegahan Covid 19 Di Provinsi DKI Jakarta, *Jurnal Kesehatan Holistic* Vol 4 Nomor 2, 2020, hal. 72

untuk menekan penyebarannya, selain itu ditunjang oleh kebiasaan hidup sehat, memakai masker dan mencuci tangan.

B. BUMDes Mitra Sejati

Badan Usaha Milik Desa atau yang umum disebut dengan BUMDes merupakan salah satu perwujudan dari adanya otonomi desa, BUMDes Mitra Sejati berperan sebagai salah satu lembaga desa yang menjadi garda terdepan dalam perekonomian masyarakat Sukorejo terlebih di masa pandemi seperti saat ini semakin menunjukkan peran aktifnya. BUMDes Mitra Sejati memiliki beberapa unit usaha yang melibatkan peran masyarakat sehingga mampu tercapainya sebuah pemberdayaan masyarakat, adapun unit usahanya yaitu berupa jasa perdagangan, jasa keuangan, pengelolaan air, laveransir, jasa perdagangan, pengelolaan air, pengelolaan sampah, bank sampah.

Hadirnya BUMDes Mitra Sejati ini sangat berarti bagi masyarakat Sukorejo, pihak BUMDes senantiasa menggandeng masyarakat setempat dalam mengelola potensi desa serta menjalankan progamnya. Banyak kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat seperti halnya UMKM setempat yang turut mendapatkan pendampingan dari BUMDes, sehingga mampu menemukan pasar baru ditengah keterpurukan kondisi ekonomi yang disebabkan oleh pandemic covid 19. Selain hal tersebut, BUMDes Mitra Sejati juga aktif menjalin kerja sama dengan berbagai pihak sebagai bentuk dukungan satu sama lain

C. Penelitian Terdahulu

PENELITIAN TERDAHULU

Dalam tahap ini peneliti telah mempelajari penelitian terdahulu yang memiliki relasi dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu ini kemudian dapat dijadikan pertimbangan oleh peneliti saat mengerjakan penelitian ini sehingga diperoleh hasil yang nantinya akan dibandingkan dengan penelitian yang dijalankan yang terkait dengan peran BUMDes. Adapun Judul penelitian ini yaitu Peran BUMDes dalam menghadapi situasi covid 19 pada masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. Sebagai bahan perbandingan terdapat 5 judul penelitian terdahulu yang mana memiliki kesesuaian tema dengan penelitian ini.

1. Penelitian oleh Ma'ruf

Penelitian Ma'ruf (2021) dengan judul Analisis Inovasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pendapatan Desa Sebelum Dan Sesudah Pandemic Covid-19 (Studi Pada Desa Sumberagung Kec. Margo Tabir Kab.Merangin). Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) untuk mengetahui inovasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat meningkatkan pendapatan desa, (2) untuk mengetahui adanya program BUMDes yang dapat memeberikan kesejahteraan terhadap masyarakat desa Sumber Agung, (3) untuk mengetahui inovasi BUMDes setelah terjadinya

covid-19. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Sumber data dibagi menjadi primer dan sekunder, data primer diperoleh dari Kepala Desa Sumber Agung dan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Sumber Agung, data sekunder berasal dari profil Badan Usaha Milik Desa Sumber Agung, buku ilmiah, jurnal, dan skripsi. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan dokumentasi. Populasi dari penelitian ini yaitu Kepala Desa Sumber Agung dan pengurus Badan Usaha Milik Desa Sumber Agung. Teknis analisis data dilakukan dengan menerapkan beberapa langkah sebagai berikut: analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, analisis tema kultural.

Hasil dari penelitian: (1) strategi inovasi yang dijalankan BUMDes setelah adanya pandemi covid 19 yaitu melaksanakan unit yang sudah ada serta melibatkan masyarakat dalam kegiatannya. Strategi pemasaran sebelum dan sesudah adanya covid-19 diantaranya seperti tetap menjalankan usaha BUMDes saat terjadinya covid-19, harga unit usaha BUMDes relative lebih murah, dibukanya pasar dan masyarakat melakukan aktivitas perdagangan dengan menjalankan protokol kesehatan, pihak BUMDes melakukan pemantauan langsung. (2) dari berbagai penyaluran anggaran pendapatan desa masyarakat sangat terbantu, karena kegiatan tersebut untuk meningkatkan silaturahmi dan kesejahteraan masyarakat dan bahkan manfaat dari pembangunan fasilitas umum dapat dirasakan oleh seluruh

masyarakat. (3) tetap menjalankan sewa tenda dengan skala kecil, menetapkan harga unit BUMDes lebih murah, memantau setiap kegiatan di pasar agar sesuai dengan protokol kesehatan.

2. Penelitian oleh Muhammad Afandi

Muhammad Afandi (2021) dengan judul penelitian Efektivitas Progam, Bumdes Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Manajemen Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Gantiwarno Pekalongan Lampung Timur). Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) untuk mengetahui konsep progam pemberdayaan ekonomi pada masyarakat desa yang dilakukan oleh BUMDes Rukun Sejahtera Desa Gantiwarno, (2) untuk mengetahui efektivitas progam Rukun sejahtera, Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Gantiwrano ditinjau dari bisnis islam. Jenis penelitian ini adalah field research atau penelitian lapangan. Adapun sumber data primernya diperoleh langsung dari proses wawancara kepada pengurus BUMDes, masyarakat desa, aparatur desa yang mengetahui efektifitas BUMDes yang selama ini berjalan, Teknik yang digunakan untuk mendapat sample penelitian yaitu snowball sampling. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan skripsi yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu kualitatif dan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) pemberdayaan masyarakat yang dijalankan di Desa Gantiwarno yaitu pemberdayaan terhadap ibu-ibu PKK, Gabungan Kelompok Tani, Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna, Karang Taruna dan BUMDes Rukun Sejahtera, pemberdayaan ini bersifat sosial dan pengembangan usaha mengedepankan peningkatan ekonomi bersama BUMDes melakukan pelatihan mengenai kewirausahaan. Diperlukan peningkatan pemanfaatan potensi desa pada bidang pembibitan sehingga hal tersebut dapat berkontribusi terhadap perekonomian desa. (2) BUMDes Rukun Sejahtera telah menjalankan programnya dengan baik namun terdapat hal yang belum efektif seperti halnya unit usaha yang tidak berjalan seperti yang diharapkan, hal tersebut dikarenakan pemilihan program yang tidak tepat ditengah kondisi pandemi covid 19 sehingga berpengaruh terhadap program BUMDes.

3. Penelitian oleh Putri Andriani

Penelitian oleh Putri Andriani (2020) Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat pada Masa Pandemi (Covid 19) Ditinjau dalam Prespektif Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Bumdes Sejahtera Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar). Tujuan penelitian ini yaitu (1) peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pada masa pandemic (Covid-19), (2)faktor pendukung dan penghambat BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pada masa pandemi (Covid 19), (3) peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pada masa pandemi (Covid 19) ditinjau dalam prespektif ekonomi syariah.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik Accidental Sampling. Adapun sumber data dibagi menjadi dua, data primer diperoleh dari pemberi dan penerima program BUMDes, data sekunder berasal dari studi literatur dengan berbagai tulisan seperti buku-buku, karya ilmiah, internal dan informasi lainnya yang memiliki relevansi yang mendukung. Teknik pengumpulan data yang dipilih yaitu observasi, wawancara, angket dan juga dokumentasi, sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif, metode ini dipilih karena didasarkan atas desain penelitian, pendekatan penelitian serta sumber yang digali sebagai data penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) peran BUMDes telah menunjukkan kontribusinya terhadap masyarakat melalui simpan pinjam, depot air, produksi makanan dan kredit syari'ah, BUMDes juga mampu meningkatkan perekonomian dan usaha masyarakat, dibandingkan sebelum mendapatkan dana pinjaman, (2) faktor pendukung BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sudah terealisasi namun diketahui hambatan BUMDes dalam peningkatan ekonomi masyarakat seperti kurangnya modal, pengetahuan masyarakat dan kurang maksimalnya kinerja, (3) BUMDes telah sesuai dengan prinsip ekonomi islam yaitu prinsip keadilan, dengan memberikan perlakuan yang sama antara masyarakat yang satu dan lainnya.

4. Penelitian oleh Rizki Zakariya

Penelitian oleh Rizki Zakariya (2020) dengan judul Optimalisasi Peran BUMDesa Dalam Pengembangan Ekonomi Perdesaan di Masa Pandemi Covid-19. Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) untuk menguraikan dan menjelaskan urgensi optimalisasi peran BUMDesa dalam pengembangan ekonomi perdesaan di tengah pandemi covid 19, (2) menguraikan dan menganalisis upaya optimalisasi peran BUMDesa dalam pengembangan ekonomi perdesaan di tengah pandemi covid-19. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan undang undang (statute approach). Sedangkan sumber datanya diperoleh melalui penelitian kepustakaan library research). Teknik pengumpulan data yaitu melalui berbagai data terkait penelitian yang melalui empat tahapan diantaranya: editing, coding, merekrontuksi, sistematisasi badan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) urgensi optimalisasi peran BUMDes dalam pengembangan ekonomi perdesaan di tengah pandemi covid 19 potensi ekonomi perdesaan dianggap cukup besar, namun adanya covid 19 ini berimbas negative terhadap perekonomian masyarakat, oleh karena itu optimalisasi diperlukan guna memulihkan kondisi ekonomi masyarakat yang terimbas dari adanya covid-19, (2) upaya yang dilakukan dalam optimalisasi peran BUMDes di tengah pandemi covid 19 diantaranya dengan mendorong BUMDes sebagai penyedia bahan makanan pokok di desa, meningkatkan kerja sama BUMDes dengan berbagai pihak untuk pengembangan usaha, perlu dilakukan insentif dan kredit modal kerja bagi BUMDes yang terdampak covid-19.

5. Penelitian oleh Wanda Tresia Sopiana Sinaga

Penelitian oleh Wanda Tresia Sopiana Sinaga (2021) dengan judul Pengaruh Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Masa Pandemi Covid 19 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gotting Sidodadi, Kec.Bandar Kab.Asahan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu (1) untuk mengetahui pengaruh perkembangan BUMDes pada masa pandemic covid-19 terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Gotting Sidodadi. Adapun jenis penelitian yaitu penelitian Eksplansif dengan tujuan untuk menjelaskan hubungan suatu variabel dengan variable yang lain untuk menguji hipotesis, pendekatan penelitian menggunakan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus dan keanggotaan BUMDes, dan masyarakat yang menjadi konsumen setiap unit BUMDes dengan jumlah 57 orang. Teknik pengumpulan data primer dengan cara observasi dan membagikan kuesioner, Teknik pengumpulan data sekunder dengan mempelajari dan menelaah sumber buku, laporan penelitian, pendapat para ahli, data dari peneliti sebelumnya, lembaga pemerintah, maupun lembaga swasta lainnya. Teknik analisis data menggunakan Teknik analisis data kuantitatif dengan bantuan software SPSS.

Hasil penelitian yaitu: berdasarkan pengujin regresi, diperoleh hasil yaitu pengaruh faktor pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar $0,139 \times 100\% = 13,9\%$. Hal ini menunjukkan masih terdapat faktor lain yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat seperti progam bantuan sosial dan program

lainnya yakni sebesar 86,1%. Hasil pengujian regresi diperoleh $Sig\ 0,004 < 0,05$ maka disimpulkan terdapat pengaruh signifikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat di masa pandemi. Keseluruhan uji yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa variabel independent (perkembangan Badan Usaha Milik Desa) berpengaruh terhadap variabel dependent (kesejahteraan masyarakat).

5

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Ma'ruf, Analisis Inovasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pendapatan Desa Sebelum Dan Sesudah Pandemic Covid-19 (Studi Pada Desa Sumberagung Kec. Margo Tabir Kab.Merangin, (2021)	1. sama-sama membahas mengenai BUMDes di masa pandemi. 2. sama-sama membahas menegai program BUMDes dalam perekonomian masyaakat. 3. sama-sama menggunakan metode penelitian	1. subjek dan lokasi penelitian yang berbeda 2. Teknik analisis datanya berbeda.	(1) strategi inovasi yang dijalankan BUMDes setelah adanya pandemi covid 19 yaitu melaksanakan unit yang sudah ada serta melibatkan masyarakat dalam kegiatannya. pasar dan. (2) berbagai penyaluran anggaran pendapatan desa

		kualitatif.		masyarakat terbantu, sebab kegiatan tersebut meningkatkan silaturahmi dan kesejahteraan masyarakat bahkan manfaat pembangunan fasilitas umum dirasakan seluruh masyarakat. (3) tetap menjalankan sewa tenda skala kecil, menetapkan harga unit BUMDes lebih murah, memantau setiap kegiatan di pasar agar sesuai dengan protokol kesehatan.
2	Muhammad Afandi, Efektivitas Progam Bumdes Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Manajemen Bisnis	1. sama-sama membahas progam BUMDes terhadap perekonomian masyarakat. 2. sama-sama menggunakan	1. subjek dan lokasi yang berbeda. 2. analisis data yang berbeda	(1) Pemberdayaan masyarakat dijalankan di Desa Gantiwarno yaitu pemberdayaan ibu-ibu PKK, Gabungan Kelompok Tani,

	Islam (Studi Kasus Desa Gantiwarno Pekalongan Lampung Timur), (2021)	metode kualitatif.		Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna, Karang Taruna dan BUMDes Rukun Sejahtera, pemberdayaan bersifat sosial dan pengembangan usaha mengutamakan peningkatan ekonomi bersama BUMDes melakukan pelatihan mengenai kewirausahaan. peningkatan potensi desa bidang pembibitan sehingga dapat berkontribusi terhadap perekonomian desa. (2) BUMDes Rukun Sejahtera menjalankan programnya dengan baik, namun terdapat hal yang
--	----------------------------------------------------------------------	--------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				belum efektif seperti unit usaha yang tidak berjalan, pemilihan program yang tidak tepat ditengah kondisi pandemi covid 19 sehingga berpengaruh terhadap program BUMDes.
3	Putri Andriani, Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat pada Masa Pandemi (Covid 19) Ditinjau dalam Prespektif Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Bumdes Sejahtera Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar), (2020)	<ol style="list-style-type: none"> 1. sama-sama membahas megenai perekonomian BUMDes di masa pandemi. 2. sama-sama membahas mengenai pendukung dan penghambat di masa pandemi covid 19. 3. sama-sama menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. subjek dan lokasi berbeda. 2. analisis data berbeda. 3. metode penelitian yang berbeda. 	(1) peran BUMDes telah menunjukkan kontribusi terhadap masyarakat melalui simpan pinjam, depot air, produksi makanan dan kredit syari'ah, BUMDes mampu meningkatkan perekonomian dan usaha masyarakat, dibandingkan sebelum mendapatkan dana pinjaman,(2) faktor pendukung

				BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sudah terealisasi namun diketahui hambatan BUMDes berupa kurangnya modal, pengetahuan masyarakat dan kurang maksimalnya kinerja,(3)BUMDes sesuai dengan prinsip ekonomi islam yaitu prinsip keadilan, dengan memberikan perlakuan sama.
4	Rizki Zakariya, Optimalisasi Peran BUMDesa Dalam Pengembangan Ekonomi Perdesaan di Masa Pandemi Covid-19, (2020)	1. sama-sama membahas mengenai BUMDes di masa pandemic covid 19. 2. sama-sama jenis penelitian kualitatif deskriptif.	1. subjek dan lokasi penelitian berbeda. 2. Teknik pengumpulan data berbeda	1) urgensi optimalisasi peran BUMDes pengembangan ekonomi perdesaan di tengah pandemi covid 19 potensi ekonomi perdesaan dianggap cukup besar, namun adanya covid 19

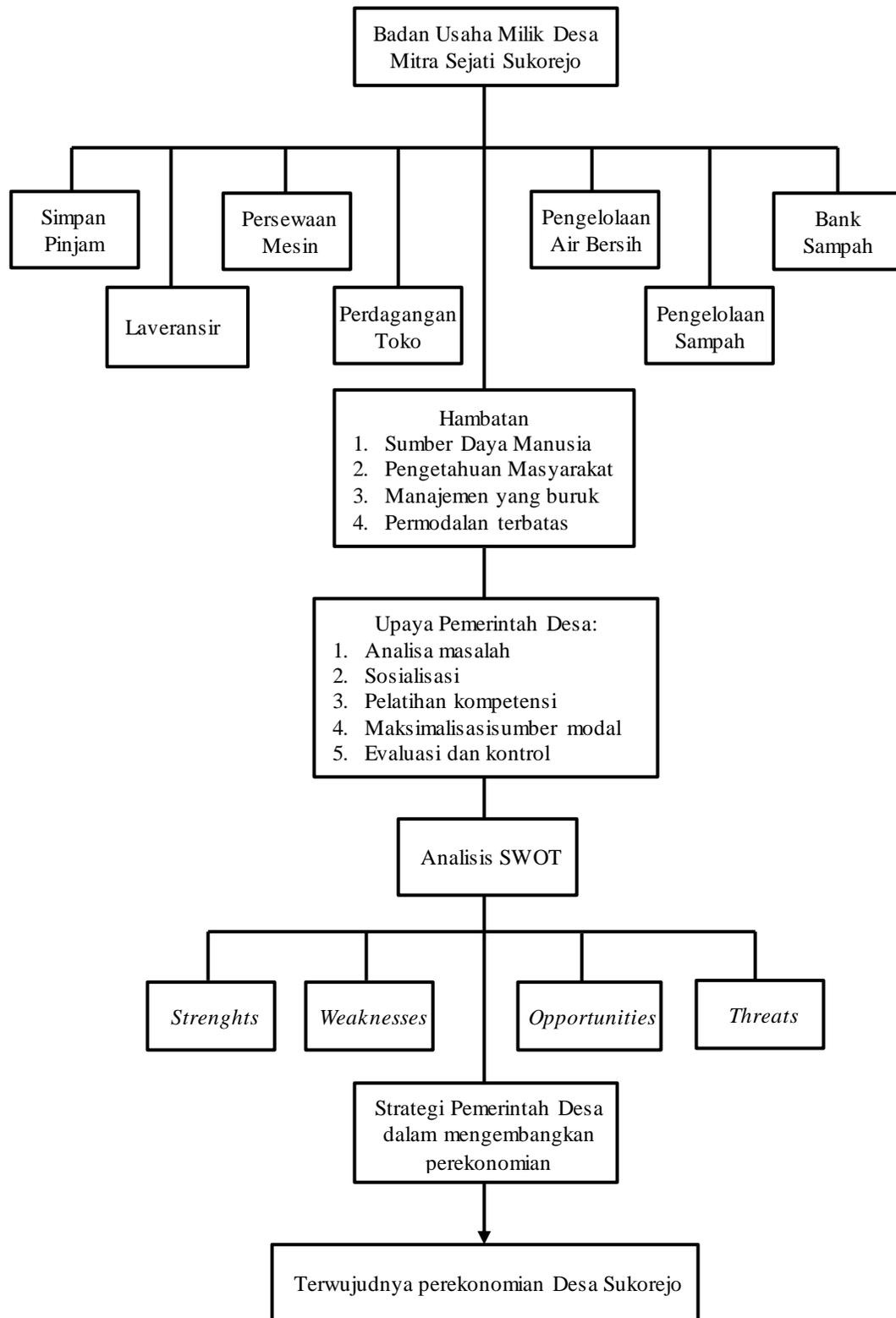
				<p>ini berimbas negative terhadap perekonomian masyarakat, karena itu optimalisasi diperlukan memulihkan kondisi ekonomi masyarakat yang terimbas dari adanya covid-19.</p> <p>(2) upaya dilakukan optimalisasi peran BUMDes di tengah pandemi covid 19 diantaranya mendorong BUMDes sebagai penyedia bahan makanan pokok di desa, meningkatkan kerja sama BUMDes dengan berbagai pihak untuk pengembangan usaha, insentif dan kredit modal kerja bagi BUMDes yang terdampak covid-19.</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5	<p>Wanda Tresia Sopiana Sinaga, Pengaruh Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Masa Pandemi Covid 19 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gotting Sidodadi, Kec.Bandar Kab.Asahan, (2021)</p>	<p>1. sama-sama membahas BUMDes di masa pandemic covid 19.</p>	<p>1. subjek dan lokasi berbeda. 2. metode penelitian berbeda. 3. pendekatan penelitian berbeda. 4. teknik analisis data berbeda.</p>	<p>berdasarkan pengujian regresi, diperoleh hasil yaitu pengaruh faktor pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes) terhadap kesejah- teraan masyarakat sebesar $0,139 \times$ $100\% = 13,9\%$. ini menunjukkan masih terdapat faktor lain yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat seperti progam bantuan sosial dan program lainnya yakni sebesar 86,1%. Hasil pengujian regresi diperoleh <i>Sig</i> $0,004 < 0,05$ maka disimpulkan terdapat pengaruh signifikan Badan Usaha Milik Desa</p>
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>(BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat masa pandemi. Keseluruhan uji yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa variabel independent (perkembangan Badan Usaha Milik Desa) berpengaruh terhadap variabel dependent (kesejahteraan masyarakat).</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D. Kerangka Berpikir

Pandemi Covid 19 bukan hanya bencana bagi bidang kesehatan, hal ini berpengaruh pada berbagai sektor kehidupan, salah satunya perekonomian. Ada banyak usaha baik dalam skala besar maupun kecil yang mulai mengalami gulung tikar, hal ini tentu saja membawa kita pada kemerosotan perekonomian. BUMDes adalah badan usaha yang mengatur strategi pengembangan desa dengan melibatkan masyarakat untuk berperan aktif di dalamnya, hakikatnya BUMDes didirikan dan dijalankan menggunakan asas kebersamaan dan gotong royong yang disertai dengan semangat kebersamaan. Adapun fungsi dari BUMDes yaitu mengembangkan dan membangun desa, memberdayakan masyarakat, menyalurkan bantuan kepada masyarakat kurang mampu melalui hibah, basos, dan APBD. Didirikannya BUMDes tentu tidak terlepas dari hambatan yang dihadapinya terutama di era pandemi serti saat ini, perlu adanya sebuah upaya untuk keluar dari permasalahan yang timbul sebagai akibat dari hambatan tersebut, selain itu tentu diperlukan strategi untuk pengembangan BUMDes kedepannya agar semakin lebih baik.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir